

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Profil dan
Kebijakan Teknis*

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP sampai dengan 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

🚩 Kepala BPKP	: Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE
🚩 Sekretaris Utama (membawahi 5 Biro)	: Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA, CIAE
🚩 Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (membawahi 5 Direktorat)	: Selamat Simanullang, Ak., M.B.A, CMA., CA., QIA., CGCAE
🚩 Pelaksana Tugas Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (membawahi 5 Direktorat)	: Iwan Taufiq Purwanto, S.E., MBA., QIA., CRMP., CGCAE., QIA., CIAE
🚩 Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (membawahi 4 Direktorat)	: Raden Suhartono, SE., M.Ak., CIAE
🚩 Deputi Bidang Akuntan Negara (membawahi 5 Direktorat)	: Dr. Sally Salamah, Ak., M.Prof.Acc., CHRP., QIA., CHRP., CGCAE., CIAE
🚩 Deputi Bidang Investigasi (membawahi 4 Direktorat)	: Agustina Arumsari, Ak., M.H., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE., CIAE

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pusat BPKP Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pusat BPKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kantor Pusat BPKP.

SAKTI terdiri dari beberapa modul Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) meliputi Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pelaporan dan Modul Administrator. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kantor Pusat BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pusat BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kantor Pusat BPKP Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh

BPKP yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pusat BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat BPKP adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Penjelasan terkait Pendapatan-LRA sebagai berikut:

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Penjelasan terkait Pendapatan-LO sebagai berikut:

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pusat BPKP adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Penjelasan terkait Belanja sebagai berikut:

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Penjelasan terkait Beban sebagai berikut:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

Penjelasan terkait Aset Lancar sebagai berikut:

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh

tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.

- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Penjelasan terkait Aset Tetap sebagai berikut:

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai

dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu

dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penjelasan terkait Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Penjelasan terkait Piutang Jangka Panjang sebagai berikut:

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Penjelasan terkait Aset Lainnya sebagai berikut:

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor

81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Penjelasan terkait Kewajiban sebagai berikut:

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Penjelasan terkait Ekuitas sebagai berikut:

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Capaian Output
Strategis Pada
Kantor Pusat
BPKP**

A.6. Capaian Output Strategis Pada Kantor Pusat BPKP

Capaian Output Strategis selama Tahun Anggaran 2022 yang telah dicapai oleh Kantor Pusat BPKP sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
			(Rp)	(Rp)				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP								
1	3665	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Hukum dan Komunikasi	2.022.670.000	2.019.533.465	99,84	4	4	100
2	3666	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Sumber Daya Manusia	22.590.545.000	21.187.219.804	93,79	3	3	100
3	3667	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Keuangan	274.761.395.000	267.018.221.530	97,18	18	18	100
4	3668	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Kelola	2.322.990.000	2.145.276.875	92,35	5	5	100

No	Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume	Progres Capaian
5	3669	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Sarana Prasarana dan Layanan Internal	64.283.274.000	63.325.373.347	98,51	670	670	100
6	3676	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	7.618.348.000	7.160.712.813	93,99	1	1	100
		Sub Jumlah-1	373.599.222.000	362.856.337.834	97,12	701	701	100

2. Program Pengawasan Pembangunan

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
			(Rp)	(Rp)				
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah								
1	4207	Pengawasan Kementerian/L embaga Bidang Ekonomi dan Keuangan	3.196.108.000	3.173.207.251	99,28	36	42	117
2	4208	Pengawasan Kementerian/L embaga Bidang Pangan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam	5.368.438.000	5.280.406.570	98,36	39	41	105
3	4209	Pengawasan Kementerian/L embaga Infrastruktur Tata Ruang dan Perhubungan	4.142.056.000	4.065.951.013	98,16	26	27	104
4	4210	Pengawasan Kementerian/L embaga Bidang Ekonomi Kreatif Perdagangan dan Ketenagakerjaan	3.817.453.000	3.773.809.023	98,86	25	25	100
5	4211	Pengawasan Kementerian/L embaga Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	2.247.526.000	2.233.461.118	99,37	18	18	100
6	4212	Pengawasan Kementerian/L embaga Bidang Pertahanan dan Keamanan	2.626.599.000	2.414.191.461	91,91	21	21	100

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
			(Rp)	(Rp)				
7	4213	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Politik dan Penegakan Hukum	1.768.531.000	1.690.258.748	95,57	14	14	100
8	4214	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	4.005.434.000	3.619.267.805	90,36	31	31	100
9	4215	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	3.281.357.000	3.050.161.751	92,95	24	24	100
10	4216	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Reformasi Birokrasi	2.795.960.000	2.690.625.934	96,23	19	19	100
11	4217	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	2.806.750.000	2.761.200.185	98,38	9	9	100
12	4218	Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah	2.913.109.000	2.912.682.421	99,99	27	27	100
13	4219	Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa	3.248.739.000	3.247.187.577	99,95	20	20	100
14	4220	Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah	4.125.400.000	4.124.453.495	99,98	11	11	100
15	4221	Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis Infrastruktur dan Perdagangan	1.635.384.000	1.630.091.792	99,68	9	9	100
16	4222	Pengawasan Badan Usaha Konektivitas Pariwisata Kawasan Industri dan Perumahan	1.597.222.000	1.589.141.373	99,49	14	14	100

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
			(Rp)	(Rp)				
17	4223	Pegawasan Badan Usaha Jasa Keuangan Jasa Penilai dan Manufaktur	2.497.991.000	2.456.725.410	98,35	21	21	100
18	4224	Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	3.402.276.000	3.244.196.710	95,35	17	17	100
19	4225	Pengawasan Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah Badan Usaha Jasa Air Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha	1.975.855.000	1.955.160.118	98,95	13	13	100
20	4226	Pengawasan Investigasi I	1.981.047.000	1.770.254.877	89,36	6	6	100
21	4227	Pengawasan Investigasi II	1.726.255.000	1.650.281.600	95,60	6	6	100
22	4228	Pengawasan Investigasi III	1.991.861.000	1.946.415.696	97,72	6		0
23	4229	Pengawasan Investigasi IV	27.794.722.000	17.815.153.783	64,10	10	10	100
24	5237	Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pengawasan Intern Nasional dan Pengembangan Metodologi Pengawasan	70.350.721.000	19.980.663.882	28,40	3366	3366	100
		Sub Jumlah-2	161.296.794.000	99.074.949.593	61,42	3.788	3.791	100

Program Prioritas Nasional Pada Kantor Pusat BPKP

A.7. Program Prioritas Nasional Pada Kantor Pusat BPKP

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Satuan Kerja Kantor Pusat BPKP terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN). Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	%	Satuan Output Strategis	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
			(Rp)	(Rp)					
Program Prioritas Nasional									
1	UAG.04	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas hambatan pelaksanaan pembangunan	3.924.783.000	3.753.372.538	95,63	Laporan	4	4	100
2	UAGU03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	13.135.352.000	13.091.705.793	99,67	Laporan	3	3	100
3	UAGU10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	2.198.299.000	2.172.608.991	98,83	Laporan	9	9	100
4	UAGU08	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L	1.250.302.000	1.236.580.015	98,90	Laporan	24	24	100
5	UAGU09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	1.293.144.000	1.292.881.881	99,98	Laporan	5	5	100
6	TBB955	Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap	400.000.000	396.848.664	99,21	Layanan	1	1	100
Jumlah Keseluruhan			22.201.880.000	21.943.997.882	98,84		46	46	100

Anggaran Belanja
 Tambahan Pada
 Kantor Pusat BPKP

A.8. Anggaran Belanja Tambahan Pada Kantor Pusat BPKP

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-089.01.1.450491/2022 Tanggal 17 November 2022, pada Satuan Kerja Kantor Pusat BPKP terdapat Alokasi Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp34.720.298.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.511.972.345,00 atau 96,52% dengan sebagai berikut:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	%	Satuan Output Strategis	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
			(Rp)	(Rp)					
Anggaran Belanja Tambahan									
1	4207.FAG001, FAG003	Pengawasan Kementerian/ Lembaga Bidang Ekonomi dan Keuangan	1.519.711.000	1.508.380.046	99,25	Laporan	15	15	100
2	4208.FAG001, FAG003	Pengawasan Kementerian/ Lembaga Bidang Pangan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam	4.184.364.000	4.137.653.097	98,88	Laporan	29	29	100
3	4209.FAG003	Pengawasan Kementerian/ Lembaga Infrastruktur Tata Ruang dan Perhubungan	3.105.430.000	3.061.328.226	98,58	Laporan	18	18	100
4	4210.FAG003	Pengawasan Kementerian/ Lembaga Bidang Ekonomi Kreatif Perdagangan dan Ketenagakerjaan	1.976.582.000	1.950.515.421	98,68	Laporan	13	13	100
5	4211.FAG001, FAG003	Pengawasan Kementerian/ Lembaga Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	1.073.602.000	1.069.400.104	99,61	Laporan	10	10	100
6	4212.FAG001, FAG003	Pengawasan Kementerian/ Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan	1.147.606.000	976.042.381	85,05	Laporan	6	6	100
7	4213.FAG003	Pengawasan Kementerian/ Lembaga Bidang Politik dan Penegakan Hukum	1.135.539.000	1.084.173.542	95,48	Laporan	6	6	100

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	%	Satuan Output Strategis	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
			(Rp)	(Rp)					
8	4214.FAG003	Pengawasan Kementerian/ Lembaga Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	2.219.813.000	1.949.261.948	87,81	Laporan	13	13	100
9	4215.FAG003	Pengawasan Kementerian/ Lembaga Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	1.951.942.000	1.776.468.519	91,01	Laporan	10	10	100
10	4216.FAG003	Pengawasan Kementerian/ Lembaga Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Reformasi Birokrasi	1.560.089.000	1.503.919.686	96,40	Laporan	6	6	100
11	4217.FAG003	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	508.524.000	503.328.287	98,98	Laporan	1	1	100
12	4218.FAG001, FAG003	Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah	1.699.475.000	1.699.339.619	99,99	Layanan	17	17	100
13	4219.FAG003	Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa	1.253.323.000	1.252.438.801	99,93	Laporan	10	10	100
14	4220.FAG003	Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah	280.559.000	279.897.668	99,76	Laporan	1	1	100
15	4221.FAG003	Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis Infrastruktur dan Perdagangan	617.569.000	617.025.758	99,91	Laporan	6	6	100
16	4222.FAG003	Pengawasan Badan Usaha Konektivitas Pariwisata Kawasan Industri dan Perumahan	625.654.000	622.843.725	99,55	Laporan	5	5	100
17	4223.FAG003	Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan Jasa Penilai dan Manufaktur	510.426.000	507.939.050	99,51	Laporan	4	4	100
18	4224.FAG001, FAG003	Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	2.478.650.000	2.414.451.500	97,41	Laporan	10	10	100
No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	%	Satuan Output	Target Keluaran	Realisasi Volume	Capaian

			(Rp)	(Rp)		Strategis		Keluaran	Output (%)
19	4225.FAG003	Pengawasan Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah Badan Usaha Jasa Air Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha	728.727.000	728.369.514	99,95	Laporan	7	7	100
20	4226.FAG003	Pengawasan Investigasi I	661.058.000	561.953.558	85,01	Laporan	3	3	100
21	4227.FAG003	Pengawasan Investigasi II	526.269.000	507.667.484	96,47	Laporan	3	3	100
22	4228.FAG003	Pengawasan Investigasi III	460.231.000	449.910.869	97,76	Laporan	3	3	100
23	4229.FAG003	Pengawasan Investigasi IV	1.009.859.000	939.046.126	92,99	Laporan	4	4	100
24	5237.AEA101	Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pengawasan Intern Nasional dan Pengembangan Metodologi Pengawasan	3.485.296.000	3.410.617.416	97,86	kegiatan	4	4	100
Jumlah Keseluruhan			34.720.298.000	33.511.972.345	96,52		204	204	100,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Kantor Pusat BPKP Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp614.535.136.000,00 dan telah dilakukan revisi anggaran, sehingga Pagu Anggaran Kantor Pusat BPKP sampai dengan 31 Desember 2022 menjadi Rp534.896.016.000,00. Adapun revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja pegawai dan belanja modal, serta kenaikan belanja barang.

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Anggaran Belanja
Anggaran Semula	339.140.640.000	167.983.733.000	107.410.763.000	614.535.136.000
Perubahan Anggaran setelah Revisi ke 16	(82.885.483.000)	26.748.486.000	(23.502.123.000)	(79.639.120.000)
Anggaran Akhir	256.255.157.000	194.732.219.000	83.908.640.000	534.896.016.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja adalah sebagai berikut:

Program	Jumlah Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Pelaksanaan Dukungan Manajemen BPKP	424.875.012.000	373.599.222.000
Program Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan BPKP	189.660.124.000	161.296.794.000
Total	614.535.136.000	534.896.016.000

Pendapatan Negara dan Hibah
Rp7.984.438.313,00

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.984.438.313,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Pusat BPKP merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
31 Desember 2022

Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	380.208.797	∞
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	393.840.000	644.432.625	163,63
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	5.870.619.000	5.870.619.839	100,00

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	440.836.295	∞
Pendapatan Denda Penyelesaian Pengerjaan Pemerintah	-	63.424.475	∞
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	-	145.880.049	∞
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	226.631.650	∞
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	-	23.398.385	∞
Pendapatan Setoran Sisa Utang TP/TGR Pensiunan PNS	-	189.006.198	∞
Total	6.264.459.000	7.984.438.313	127,46

Realisasi PNBP Lainnya s.d. 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.651.553.866,00 atau 499,03 persen dibandingkan realisasi PNBP s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp1.332.884.447,00, hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan pemindahtanganan BMN Lainnya, kenaikan Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, adanya pendapatan dari penerimaan klaim asuransi BMN, penerimaan kembali belanja barang dan kenaikan modal tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan realisasi PNBP s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi PNBP s.d 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP (Rp)		Naik / (Turun)	
	31/12/2022	31/12/2021	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	380.208.797	50.999.999	329.208.798	645,51
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	644.432.625	171.588.200	472.844.425	275,57
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	5.870.619.839	-	5.870.619.839	100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	440.836.295	507.067.707	(66.231.412)	(13,06)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pengerjaan Pemerintah	63.424.475	149.661.847	(86.237.372)	(57,62)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	145.880.049	230.659.359	(84.779.310)	(36,76)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	226.631.650	-	226.631.650	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	23.398.385	6.066.250	17.332.135	285,71
Pendapatan Setoran Sisa Utang TP/TGR Pensiunan PNS	189.006.198	216.841.085	(27.834.887)	(12,84)
Total	7.984.438.313	1.332.884.447	6.651.553.866	499,03

Belanja Negara
Rp461.931.287.427,
00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja 31 Desember 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp461.931.287.427,00 atau 86,36 persen dari anggaran sebesar Rp534.896.016.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program s.d. 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program
31 Desember 2022

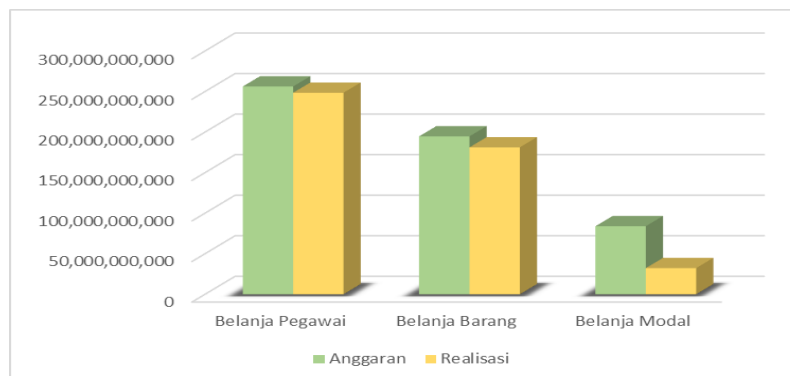
Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
WA	Pelaksanaan Dukungan Manajemen BPKP	373.599.222.000	362.856.337.834	97,12
CH	Program Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan BPKP	161.296.794.000	99.074.949.593	61,42
Jumlah		534.896.016.000	461.931.287.427	86,36

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja
31 Desember 2022

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	256.255.157.000	248.513.075.310	96,98
52	Belanja Barang	194.732.219.000	181.176.942.363	93,04
53	Belanja Modal	83.908.640.000	32.241.269.754	38,42
Jumlah		534.896.016.000	461.931.287.427	86,36

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp48.649.789.721,00 atau 11,77 persen dibandingkan realisasi belanja 31 Desember 2021 disebabkan adanya kenaikan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember Tahun 2022 dan 2021

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
		31/12/2022	31/12/2021	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	248.513.075.310	236.413.043.915	12.100.031.395	5,12
52	Belanja Barang	181.176.942.363	145.649.181.087	35.527.761.276	24,39
53	Belanja Modal	32.241.269.754	31.219.272.704	1.021.997.050	3,27
	Total	461.931.287.427	413.281.497.706	48.649.789.721	11,77

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp248.513.075.310,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp248.513.075.310,00 dan Rp236.413.043.915,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	114,482,968,000	112,518,850,743	98,28
Belanja Lembur	4,241,264,000	3,893,040,000	91,79
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	137,530,925,000	132,101,184,567	96,05
Total	256,255,157,000	248,513,075,310	96,98

Realisasi belanja pegawai (*netto*) sebesar Rp248.513.075.310,00 berasal dari belanja pegawai (*bruto*) sebesar Rp248.951.355.572,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp438.280.262,00.

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021, terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp12.100.031.395,00 atau 5,12 persen disebabkan bertambahnya Belanja Lembur dan Belanja Tunjangan Khusus atau belanja pegawai transito.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31/12/2022	31/12/2021	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	112.518.850.743	114.545.331.638	(2.026.480.895)	(1,77)
Belanja Lembur	3.893.040.000	3.291.972.050	601.067.950	18,26
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	132.101.184.567	118.575.740.227	13.525.444.340	11,41
Total	248.513.075.310	236.413.043.915	12.100.031.395	5,12

Realisasi Belanja
Barang
Rp181.176.942.363,0
0

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp181.176.942.363,00 dan Rp145.649.181.087,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	19.856.043.000	19.704.153.631	99,24
Belanja Barang Non Operasional	9.285.051.000	7.890.405.963	84,98
Belanja Barang Persediaan	6.434.379.000	6.403.218.300	99,52
Belanja Jasa	25.882.326.000	24.398.929.115	94,27
Belanja Pemeliharaan	9.842.415.000	9.710.801.164	98,66
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	123.432.005.000	113.069.434.190	91,60
Total	194.732.219.000	181.176.942.363	93,04

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp181.176.942.363,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp181.969.711.563,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp792.769.200,00.

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021, terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp35.527.761.276,00 atau 24,39 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan belanja barang operasional, non operasional, jasa, pemeliharaan dan kenaikan belanja perjalanan dalam negeri.

Perbandingan realisasi Belanja Barang 31 Desember Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31/12/2022	31/12/2021	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	19.704.153.631	17.379.175.343	2.324.978.288	13,38
Belanja Barang Non Operasional	7.890.405.963	7.479.610.794	410.795.169	5,49
Belanja Barang Persediaan	6.403.218.300	7.779.083.466	(1.375.865.166)	(17,69)
Belanja Jasa	24.398.929.115	20.439.640.828	3.959.288.287	19,37
Belanja Pemeliharaan	9.710.801.164	8.874.528.822	836.272.342	9,42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	113.069.434.190	83.697.141.834	29.372.292.356	35,09
Total	181.176.942.363	145.649.181.087	35.527.761.276	24,39

Pada tahun 2022 terdapat belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang menjadi asset tetap Peralatan dan Mesin berupa *roller blind* sebesar Rp91.330.115,00.

B.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp32.241.269.754,00

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp32.241.269.754,00 dan Rp31.219.272.704,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.823.487.000	22.476.285.059	32,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.970.640.000	4.200.945.858	84,52
Belanja Modal Lainnya	9.114.513.000	5.564.038.837	61,05
Total	83.908.640.000	32.241.269.754	38,42

Realisasi belanja modal (*netto*) sebesar Rp32.241.269.754,00 berasal dari belanja modal (*bruto*) sebesar Rp32.241.269.754,00, tidak ada pengembalian belanja pada belanja modal 31 Desember 2022. Capaian belanja modal hanya terserap 38,42 persen dari anggaran dikarenakan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal lainnya dari sumber dana pinjaman luar

negeri tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai dengan kriteria TKDN.

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021, terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.021.997.050,00 atau 3,27 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja modal peralatan dan Mesin.

Perbandingan realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	31/12/2022	31/12/2021	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.476.285.059	14,007,073,527	8.469.211.532	60,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.200.945.858	14,940,550,159	(10.739.604.301)	(71,88)
Belanja Modal Lainnya	5.564.038.837	2,271,649,018	3.292.389.819	144,93
Total	32.241.269.754	31.219.272.704	1.021.997.050	3,27

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 sebesar Rp32.241.269.754,00 telah dicatat seluruhnya sebagai perolehan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Nama Aset Tetap	Nilai (Rp)
Peralatan dan Mesin	18.565.021.059
Gedung dan Bangunan	873.079.463
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.239.130.395
Aset Tak Berwujud	2.042.862.837
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	3.521.176.000
Total	32.241.269.754

Pada tahun 2022 terdapat belanja modal Gedung dan Bangunan yang menjadi asset tetap Peralatan dan Mesin berupa AC Split sebesar Rp18.158.490,00.

B.2.4 Belanja Penanganan Pandemi COVID-19

Kantor Pusat BPKP sampai dengan 31 Desember 2022 telah mengalokasikan anggaran belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp8.083.956.000,00. Anggaran

tersebut terserap sebesar Rp7.929.315.067,00 dengan rincian yang tersaji pada Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19

No	Akun	Alokasi Anggaran/DIPA (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
1.	521131	267.577.000	267.482.414	99,96
2.	521241	230.074.000	224.958.709	97,78
3.	521841	2.392.262.000	2.367.768.033	98,98
4.	522192	2.682.525.000	2.575.378.000	96,01
5.	524115	2.511.518.000	2.493.727.911	99,29
Total		8.083.956.000	7.929.315.067	98,09

Realisasi belanja penanganan Covid (*netto*) sebesar Rp7.929.315.067,00 berasal dari belanja penanganan Covid (*bruto*) sebesar Rp7.068.041.317,00, setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp38.726.250,00.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp3.190.429.974

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.190.429.974,00 dan Rp3.889.538.124,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Kantor Pusat BPKP per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Aset Lancar	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	63.245.000	1.574.932.441
2	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	10.118.900	-
3	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	231.805.832	618.460.000
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(1.159.029)	(198.721.525)
5	Persediaan	2.886.419.271	1.894.867.208
	Total	3.190.429.974	3.889.538.124

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
Rp63.245.000

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp63.245.000,00 dan Rp1.574.932.441,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya berupa sisa kupon BBM yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp63.245.000,00.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Rp10.118.900

C.1.2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp10.118.900,00 dan Rp0,00. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp10.118.900,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran uang makan Deputi Akuntan Negara yang disetorkan pada Bulan Maret 2023.

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp231.805.832,00

C.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp231.805.832,00 dan Rp618.460.000,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 sebesar Rp231.805.832,00 merupakan piutang atas ganti rugi bea siswa atas PNS yang telah diberhentikan dengan hormat yang akan dilunasi/jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Total Piutang per 31 Des 2022	Bagian Lancar	Jangka Panjang
1	Tresna Sahabakti	90.817.500	90.817.500	-
2	Muhajir Hakim	164.600.000	3.000.000	161.600.000
3	Ricky Hardianto	47.699.200	47.699.200	-
4	Sulton	179.606.632	179.606.632	-
5	M Syarly Eko Saputra	1.500.000	1.500.000	-
	Total	484.223.332	231.805.832	161.600.000

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp1.159.029,00

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar minus Rp1.159.029,00 dan minus Rp198.721.525,00. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar minus Rp1.159.029,00 adalah 0,5% dari Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sebesar Rp231.805.832,00.

Persediaan
Rp2.886.419.271,00

C.1.5. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.886.419.271,00 dan Rp1.894.867.208,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Barang Konsumsi	1.459.986.005	510.309.284
2	Barang Untuk Pemeliharaan	74.055.395	138.170.895
3	Suku Cadang	1.986.930	1.986.930
4	Persediaan Lainnya	1.350.390.941	1.244.400.099
Total		2.886.419.271	1.894.867.208

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp
894.973.375.919

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp894.973.375.919,00 dan Rp896.434.856.731,00 yang merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Pusat BPKP.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Tanah	553.179.466.285	555.707.204.377
2	Peralatan dan Mesin	170.897.198.754	147.752.071.354
3	Gedung dan Bangunan	340.078.611.476	330.158.888.963
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	196.225.000	196.225.000
5	Aset Tetap Lainnya	3.094.747.429	3.094.747.429
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	135.734.530	4.403.350.619
	Nilai Perolehan	1.067.581.983.474	1.041.312.487.742
7	Akumulasi Penyusutan	(172.608.607.555)	(144.877.631.011)
	Nilai Buku	894.973.375.919	896.434.856.731

Tanah
Rp553.179.466.285,00

C.2.1. Tanah

Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp553.179.466.285,00 dan Rp555.707.204.377,00.

Mutasi nilai Tanah selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021	555.707.204.377
Mutasi Tambah:	-
Mutasi Kurang: Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(2.527.738.092)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	553.179.466.285

Mutasi Kurang Tanah sebesar Rp2.527.738.092,00 merupakan pelepasan hak tanah dikarenakan pelunasan Rumah Negara golongan 2.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran Daftar Tanah.

Peralatan dan Mesin
Rp170.897.198.754,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp170.897.198.754,00 dan Rp147.752.071.354,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp116.613.758.811,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp54.283.439.943,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	147.752.071.354
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	17.405.664.559
- Transfer Masuk	1.795.944.614
- Reklasifikasi Masuk	369.510.840
- Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	977.816.000
- Pengembangan Nilai Aset	181.540.500
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	3.911.264.000
- Perolehan Lainnya	109.488.605
Jumlah Mutasi Tambah	24.751.229.118
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar	(1.056.858.878)
- Reklasifikasi Keluar	(369.510.840)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(179.732.000)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.606.101.718)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	170.897.198.754
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(116.613.758.811)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	54.283.439.943

Mutasi nilai perolehan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pembelian sebesar Rp17.405.664.559,00 yang seluruhnya berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Transfer Masuk sebesar Rp1.795.944.614,00 merupakan peralatan dan mesin yang diterima dari satker lain di Lingkungan BPKP selama Tahun 2022, sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

- Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp977.816.000,00 merupakan perolehan BMN yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin namun ada kesalahan pencatatan ke Persediaan sebesar pada saat melakukan pendetilan pada Modul Komitmen.
- Pengembangan Nilai Aset Peralatan Mesin sebesar Rp181.540.500,00 merupakan transaksi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk membukukan penambahan nilai BMN sebagai akibat pelaksanaan renovasi atau restorasi yang memenuhi kapitalisasi aset.
- Penyelesaian Pembangunan KDP sebesar Rp3.911.264.000,00 merupakan penyelesaian atas kontrak multiyear.
- Perolehan Lainnya sebesar Rp109.488.605,00 merupakan pencatatan peralatan dan mesin yang diperoleh dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa roller blind sebesar Rp91.330.115,00 dan belanja modal gedung dan bangunan berupa AC Split sebesar Rp18.158.849,00.
- Transfer Keluar sebesar Rp1.056.858.778,00 merupakan peralatan dan mesin yang diserahkan ke satker lain di lingkungan BPKP selama Tahun 2022, sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.
- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp179.732.000,00 merupakan transaksi untuk mereklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya sebagai aset lain-lain. Hal ini disebabkan karena BMN tersebut berubah kondisinya yang semula baik atau rusak ringan menjadi rusak berat.
- Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar sebesar Rp369.510.840,00 merupakan kesalahan pencatatan kodefikasi Peralatan dan Mesin.

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak dicatat di Neraca. Namun, dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi dengan nilai BMN sebesar Rp386.869.472,00.

Gedung dan Bangunan
Rp340.078.611.476,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp340.078.611.476,00 dan Rp330.158.888.963,00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.987.507.106,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp 285.091.104.370,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	330.158.888.963
Mutasi Tambah:	
- Pengembangan Melalui KDP	9.088.199.925
- Pengembangan Nilai Aset	873.079.463
Jumlah Mutasi Tambah	9.961.279.388
Mutasi Kurang:	
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(41.556.875)
Jumlah Mutasi Kurang	(41.556.875)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	340.078.611.476
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(54.987.507.106)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	285.091.104.370

Mutasi nilai perolehan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengembangan melalui KDP sebesar Rp9.088.199.925,00 merupakan penambahan aset atas penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp873.079.463,00 merupakan rehab gedung kantor pusat BPKP, Graha SDM dan rehab Rumah Dinas.
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp41.556.875,00 merupakan transaksi atas tindak lanjut temuan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan BPKP TA 2021 sebesar Rp23.398.385,00 dan koreksi atas pencatatan AC Split yang diperoleh dari belanja modal gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin sebesar Rp18.158.490,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp196.225.000,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp196.225.000,00 dan Rp196.225.000,00. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp168.559.250,00, sehingga nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.665.750,00.

Tidak terdapat mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2022.

Aset Tetap Lainnya
Rp3.094.747.429,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.094.747.429,00 dan Rp3.094.747.429,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, termasuk didalamnya berupa Aset Tetap Renovasi sebesar Rp2.012.563.043,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp838.782.388,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp2.255.965.041,00.

Tidak terdapat mutasi nilai Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2022.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp135.734.530,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp135.734.530,00 dan Rp4.403.350.619,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.403.350.619
Mutasi Tambah:	
- Perolehan/Penambahan KDP	3.409.143.832
- Pengembangan KDP	3.829.986.563
- Koreksi Nilai KDP	1.492.717.441
Jumlah Mutasi Tambah	8.731.847.836
Mutasi Kurang:	
- Pengembangan Melalui KDP	(12.999.463.925)
Jumlah Mutasi Kurang	(12.999.463.925)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	135.734.530

Transaksi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp3.409.143.832,00

merupakan transaksi perekaman SP2D pertama kali untuk pembayaran pertama dalam rangka memperoleh aset tetap yang pembayarannya dilakukan per termin.

- Pengembangan KDP sebesar Rp3.829.986.563,00 merupakan transaksi lanjutan atas perekaman SP2D setelah transaksi perolehan KDP dilakukan.
- Koreksi Nilai KDP sebesar Rp1.492.717.441,00 merupakan penyelesaian pekerjaan yang telah dibayarkan tahun 2021 dan baru diselesaikan sepenuhnya di tahun 2022.
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp12.999.463.925,00 merupakan penyelesaian pekerjaan rehab dan telah dilakukan reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp172.608.607.555,00)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp172.608.607.555,00 dan Rp144.877.631.011,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	553.179.466.285	0	553.179.466.285
2	Peralatan dan Mesin	170.897.198.754	(116.613.758.811)	54.283.439.943
3	Gedung dan Bangunan	340.078.611.476	(54.987.507.106)	285.091.104.370
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	196.225.000	(168.559.250)	27.665.750
5	Aset Tetap Lainnya	3.094.747.429	(838.782.388)	2.255.965.041
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	135.734.530	0	135.734.530
	Total	1.067.581.983.474	(172.608.607.555)	894.973.375.919

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2022 (Rp)	Saldo per 31/12/2021 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	116.613.758.811	99.650.755.560	16.963.003.251	16.861.407.179	101.596.072
2	Gedung dan Bangunan	54.987.507.106	44.377.098.421	10.610.408.685	10.612.491.460	(2.082.775)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	168.559.250	157.492.950	11.066.300	11.066.300	-
4	Aset Tetap Lainnya	838.782.388	692.284.080	146.498.308	146.498.308	-
	Total	172.608.607.555	144.877.631.011	27.730.976.544	27.631.463.247	99.513.297

Penjelasan atas selisih tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Transaksi	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
1	Transfer Masuk	960.714.508	-	960.714.508
2	Transfer Keluar	(679.386.436)	-	(679.386.436)
3	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(179.732.000)	-	(179.732.000)
4	Koreksi Nilai Berkurang	-	(2.082.775)	(2.082.775)
	Total	101.596.072	(2.082.775)	99.513.297

Piutang Jangka Panjang
Rp446.314.624,00

C.3. Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp446.314.624,00 dan Rp162.533.160,00. Piutang tersebut merupakan tuntutan penggantian atas kerugian yang diderita terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri non bendahara.

Rincian Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 17

Rincian Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	29.602.610.865	29.233.420.114
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	(29.156.296.241)	(29.070.886.954)
	Total	446.314.624	162.533.160

Tagihan TP/TGR
Rp29.602.610.865,00

C.3.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.602.610.865,00 dan Rp29.233.420.114,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi

adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
Tagihan TGR atas Tuntutan GRID	28.407.881.415	28.575.347.764
Tagihan TGR atas Kelebihan Pembayaran Gaji	217.751.100	217.751.100
Tagihan TGR atas Pengembalian Bea Siswa	445.201.250	440.321.250
Tagihan TGR atas PTDH	531.777.100	-
Total	29.602.610.865	29.233.420.114

Sedangkan mutasi Tagihan TP/TGR s.d. 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021	29.233.420.114
Mutasi Tambah:	
- Penetapan Ganti Rugi Tahun 2022	506.564.332
- Reklasifikasi Piutang dari Bagian Lancar	618.460.000
Jumlah Mutasi Tambah	1.125.024.332
Mutasi Kurang	
- Pembayaran s.d. Tahun 2022	(440.836.295)
- Hapus Buku	(79.866.920)
- Penyesuaian Nilai Hasil Rekonsiliasi dengan KPKNL	(3.324.534)
- Reklasifikasi Piutang ke Bagian Lancar	(231.805.832)
Jumlah Mutasi Kurang	(755.833.581)
Saldo per 31 Desember 2022	29.602.610.865

- Mutasi Tambah sebesar Rp506.564.332,00 berupa penetapan ganti rugi ikatan dinas terhadap 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) pegawai yang mengundurkan diri sebagai PNS sampai dengan 31 Desember 2022. namun periode ikatan dinasnya belum selesai sebesar Rp277.758.500,00 dan 3 (tiga) pegawai yang diberhentikan karena melanggar hukuman disiplin sebesar Rp228.805.832,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah (Rp)
A.	PDH APS	
1	Octavian Abrianto	32.630.000
2	Kevin Nugraha	2.250.000
3	Jerry Novagar wisnu W	30.592.000

4	Reza Kurniawan	28.885.500
5	Andhika Novianto M	32.158.000
6	Arfan Aryanto Dalimunthe	31.667.000
7	Daissy Erdianthy	59.000.000
8	Achprizar Greheta	21.250.000
9	Suherman	1.286.000
10	Edi Setiawan	1.500.000
11	Restiyani Frischa	36.540.000
Total A		277.758.500
B.	PDH TAPS	
11	Ricky Hardianto	47.699.200
12	Sulton	179.606.632
13	M Syarly Eko Saputra	1.500.000
Total B		228.805.832
Jumlah		506.564.332

- Mutasi tambah berupa Reklasifikasi Piutang dari Bagian Lancar sebesar Rp618.460.000,00 merupakan penambahan piutang lancar dikarenakan pencatatan menggunakan modul piutang pada aplikasi SAKTI dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Jumlah (Rp)
1	Tresna Sahabakti	90.817.500
2	Muhajir Hakim	3.000.000
3	Muhamad Irvan Widya	90.730.000
4	Dwita Ayu Rahmadanti	90.730.000
5	Aulia Prastika Praja	10.000.000
6	Mohamad Handoko	50.000.000
7	Bimo Seno	56.595.000
8	Erwin Adiyatno	21.429.000
9	Akbar Putra Asyik	72.897.000
10	Rusdhy Fanie	57.090.000
11	Andi Prabowo	55.671.500
12	M Hardanu Hermawan	19.500.000
Total		618.460.000

- Mutasi kurang berupa Pembayaran s.d. Tahun 2022 sebesar Rp440.836.295,00 terdiri atas:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran atas Tagihan GRID Tahun 2022	277.758.500
2	Pembayaran atas Tagihan GRID sebelum Tahun 2022 melalui KPKNL	100.814.895
3	Pembayaran atas Tagihan GRID sebelum Tahun 2022 melalui BPKP	60.512.900
4	Angsuran atas Tagihan Pengembalian Bea Siswa STAR	1.750.000
Total		440.836.295

Pembayaran atas Tagihan GRID sebelum Tahun 2022 melalui KPKNL sebesar Rp100.814.895,00 merupakan pelunasan atas piutang yang telah diserahkan ke KPKNL yang terdiri dari 6

(enam) orang pegawai sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah (Rp)
1	Patty Iranda	30.000.000
2	Harriyanto Suyatman	41.667.000
3	Syafrial Firdaus	3.564.815
4	Antonius Mikael S	12.000.000
5	Agus Salim Daroini	7.129.000
6	Arliau Judi	6.454.080
	Jumlah	100.814.895

Pembayaran atas Tagihan GRID sebelum Tahun 2022 melalui BPKP sebesar Rp60.512.900,00 merupakan pelunasan piutang yang masih dikelola oleh BPKP yang terdiri dari 3 (orang) antara lain:

No	Nama	Jumlah (Rp)
1	Andi Prabowo	36.123.900
2	Rochardi	4.889.000
3	M Hardanu Hermawan	19.500.000
	Jumlah	60.512.900

Angsuran atas Tagihan Pengembalian Bea Siswa STAR sebesar Rp1.750.000,00 merupakan realisasi pembayaran dari 1 (satu) orang pegawai a.n Muhajir Hakim sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran selama Tahun 2022.

- Mutasi kurang berupa hapus buku sebesar Rp79.866.920,00 merupakan penyesuaian saldo piutang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah (Rp)
1	Antonius Mikael S (crash program)	38.000.000
2	Arliau Judi (crash program)	20.437.920
3	Erwin Adiyatno (potong taspen)	21.429.000
	Jumlah	79.866.920

- Mutasi kurang berupa Penyesuaian Nilai Hasil Rekonsiliasi dengan KPKNL sebesar Rp3.324.534,00 merupakan koreksi nilai atas 6 (enam) debitur yang telah diserahkan ke KPKNL antara lain:

No	Nama Debitur	Jumlah (Rp)
1	Agus Pudji Nur Tjahjono	5.231.481
2	Bambang Arief W	14.269
3	Triashadi	(26.510)
4	Muh Gunawan	(1.818.182)
5	Pramono	(1.818.182)
6	Achmad Luthfy	(4.907.410)
	Total	(3.324.534)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Tagihan TP/TGR
(Rp29.156.296.241,00)

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar minus Rp Rp29.156.296.241,00 dan minus Rp29.070.886.864,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Uraian	Kategori	% Penyisihan	Jumlah Piutang (Rp)	Jumlah Penyisihan (Rp)
Tagihan TGR atas Tuntutan GRID	Macet	100	28.407.881.415	28.407.881.415
Tagihan TGR atas Kelebihan Pembayaran Gaji	Macet	100	217.751.100	217.751.100
Tagihan TGR Bea Siswa STAR	Macet	100	276.971.250	276.971.250
	Lancar	0,5	168.230.000	841.150
Tagihan TGR atas PTDH	Macet	100	191.460.000	191.460.000
	Ragu-Ragu	50	106.595.000	53.297.500
	Kurang Lancar	10	72.897.000	7.289.700
	Lancar	0,5	160.825.100	804.126
Jumlah			29.602.610.865	29.156.296.241

Aset Lainnya
Rp8.848.880.337,00

C.4. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp8.848.880.337,00 dan Rp4.650.399.865,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	12.542.831.455	5.755.615.873
2	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	932.176.745
3	Aset Lain-Lain	4.376.913.461	4.927.481.461
Nilai Perolehan		16.919.744.916	11.615.274.079
Akumulasi Penyusutan		(8.070.864.579)	(6.964.874.214)
Nilai Buku		8.848.880.337	4.650.399.865

Aset Tak Berwujud
Rp12.542.831.455

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp12.542.831.455,00 dan Rp5.755.615.873,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa *software* untuk menunjang operasional kantor. Akumulasi Amortisasi ATB per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.634.298.089,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp7.908.533.366,00.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	5.755.615.873
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	529.519.000
- Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	633.049.837
- Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	880.294.000
- Pengembangan melalui KDP	4.744.352.745
Jumlah Mutasi Tambah	6.787.215.582
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	12.542.831.455
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(4.634.298.089)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	7.908.533.366

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Pembelian sebesar Rp529.519.000,00 merupakan realisasi belanja modal lainnya atas pembelian *software*.
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp633.049.837,00 merupakan realisasi belanja modal lainnya atas penambahan nilai *software*.
- Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp880.294.000,00 merupakan kesalahan pencatatan ke Persediaan sebesar pada saat melakukan pendetilan pada Modul Komitmen.
- Pengembangan melalui KDP sebesar Rp4.744.352.745,00 merupakan penambahan aset atas penyelesaian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp0,00

C.4.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (ATB-DP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp932.176.745,00.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	932.176.745
Mutasi Tambah:	
- Perolehan/Penambahan KDP	2.200.735.000
- Pengembangan KDP	1.320.441.000
- Transfer Masuk KDP	291.000.000
Jumlah Mutasi Tambah	3.812.176.000
Mutasi Kurang:	
- Pengembangan Melalui KDP	(4.199.787.449)
- Penyelesaian Pengembangan melalui KDP	(544.565.296)
Jumlah Mutasi Kurang	(4.744.352.745)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0

Aset Lain-Lain
Rp4.376.913.461,00

C.4.3. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.376.913.461,00 dan Rp4.927.481.461,00. Jumlah tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pusat BPKP serta dalam proses penghapusan dari BMN. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.436.566.490,00. sehingga nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan sebesar Rp940.346.971,00.

Mutasi nilai Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.927.481.461
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	179.732.000
Mutasi Kurang:	
- Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(730.300.000)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.376.913.461
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(3.436.566.490)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	940.346.971

Mutasi tambah berupa Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp179.732.000,00 merupakan transaksi yang disebabkan karena perubahan kondisi aset Peralatan dan Mesin yang semula baik atau rusak ringan menjadi rusak berat.

Mutasi kurang berupa Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan

sebesar Rp730.300.000,00 merupakan penghapusan BMN rusak berat dari neraca berdasarkan keputusan maupun risalah lelang (penjualan).

Nilai perolehan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.376.913.461,00 merupakan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp1.931.209.461,00 dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp2.445.704.000,00.

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp8.070.864.579,00)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp8.070.864.579,00 dan Rp6.964.874.214,00.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	12.542.831.455	4.634.298.089	7.908.533.366
2	Aset Lain-Lain	4.376.913.461	3.436.566.490	940.346.971
	Total	16.919.744.916	8.070.864.579	8.848.880.337

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2022 (Rp)	Saldo per 31/12/2021 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.634.298.089	3.004.062.781	1.630.235.308	1.630.235.308	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak	3.436.566.490	3.960.811.433	-524.244.943	26.323.057	(550.568.000)
	Total	8.070.864.579	6.964.874.214	1.105.990.365	1.656.558.365	(550.568.000)

Selisih sebesar minus Rp550.568.000,00 tersebut disebabkan adanya Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp Rp179.732.000,00,00 dan adanya Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp730.300.000,00.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain, serta disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut.

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp1.200.006.170,00

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.200.006.170,00 dan Rp1.108.958.894,00 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	608.227.419	665.110.102
2	Pendapatan Diterima Dimuka	591.778.751	443.848.792
	Total	1.200.006.170	1.108.958.894

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp608.227.419,00

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp608.227.419,00 dan Rp665.110.102,00. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 22 berikut ini.

Tabel 22
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
Belanja Pegawai Yang Masih Harus dibayar	56.703.479	252.460.916
Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar	551.523.940	412.649.186
Total	608.227.419	665.110.102

Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp56.703.479,00 terdiri dari uang makan yang belum dibayar sebesar Rp738.000,00 dan kekurangan gaji bulan Desember 2021 sebesar Rp 55.965.479,00.

Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp551.523.940,00 merupakan biaya langganan daya dan jasa

bulan Desember 2021 yang dibayarkan di Tahun 2022 yang terdiri dari Langganan Listrik sebesar Rp502.596.650,00, Langganan Air sebesar Rp33.010.125,00 dan Langganan Telepon sebesar Rp15.917.165,00.

Pendapatan Diterima Dimuka
Rp591.778.751,00

C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp591.778.751,00 dan Rp443.848.792.00.

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 tersebut merupakan pendapatan sewa Gedung dan ATM dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Obyek Sewa	Jangka Waktu (Periode)	Nilai Sewa (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 (Rp)
1	ATM Mandiri	3 th (1/7/2021 s.d.30/6/2024)	69.720.000	34.860.000
2	PT. Teknindo Bangun Sarana	5 th (01/11/2019 s.d. 31/10/2024)	196.460.000	72.035.334
3	ATM BNI	3 th (02/12/2019 s.d. 01/12/2022)	65.895.000	-
4	Gedung BRI	2 th (1/6/2022 s.d. 31/5/2024)	494.600.000	350.341.667
5	ATM BRI (Pos)	2 th (1/6/2022 s.d. 31/5/2024)	38.449.000	27.234.708
6	ATM BRI (Lobby Timur)	1 th (7/9/2022 s.d.6/9/2023)	20.792.000	14.380.000
7	ATM BRI (Lobby Barat)	1 th (1/1/2023 s.d.31/12/2023)	21.674.000	21.674.000
8	Koperasi	5 th (01/01/2020 s.d. 01/01/2025)	167.580.000	67.032.000
9	Koperasi Lantai 12	1 th (13/5/2022 s.d. 12/5/2023)	12.663.125	4.221.042
Total				591.778.751

Ekuitas
Rp906.258.994.684,00

C.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp906.258.994.684,00 dan Rp904.028.368.986,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Operasional
(Rp457.434.047.074,
00)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar minus Rp457.434.047.074,00 dan minus Rp408.399.242.745,00. Jumlah Tahun 2022 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp559.927.141,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp457.993.974.215,00.

Pendapatan
Operasional
Rp559.927.141,00

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp559.927.141,00 dan Rp484.938.755,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp559.927.141,00

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp559.927.141,00 dan Rp484.938.755,00.

Rincian PNBP Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	496.502.666	335.276.908	161.225.758	48,09
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	63.424.475	149.661.847	(86.237.372)	(57,62)
Total	559.927.141	484.938.755	74.988.386	15,46

Realisasi menurut LO Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar minus Rp147.929.959,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	496.502.666	644.432.625	(147.929.959)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	63.424.475	63.424.475	-
Total	559.927.141	707.857.100	(147.929.959)

Selisih Pendapatan Operasional menurut LO dan LRA sebesar Rp147.929.959,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan diterima s.d. 2021, namun masa pemanfaatan aset melewati 2022	443.848.792
Pendapatan diterima s.d. Desember 2022, namun masa pemanfaatan aset melewati Desember 2022	(591.778.751)
Total	(147.929.959)

Beban Operasional
Rp457.993.974.215,
00

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp457.993.974.215,00 dan Rp408.884.181.500,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.

Rincian Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Rincian Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	248.307.198.973	236.473.758.203	11.833.440.770	5,00
Beban Persediaan	5.375.350.556	8.396.511.622	(3.021.161.066)	(35,98)
Beban Barang dan Jasa	52.132.363.463	45.420.271.383	6.712.092.080	14,78
Beban Pemeliharaan	9.674.756.730	9.006.803.988	667.952.742	7,42
Beban Perjalanan Dinas	113.069.434.190	83.697.141.834	29.372.292.356	35,09
Beban Penyusutan dan Amortisasi	29.288.021.612	26.086.803.769	3.201.217.843	12,27
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	146.848.691	(197.109.299)	343.957.990	(174,50)
Total	457.993.974.215	408.884.181.500	49.109.792.715	12,01

D.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp248.307.198.973,
00

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp248.307.198.973,00 dan Rp236.473.758.203,00. Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 26 berikut ini:

Tabel 26
Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	112.312.974.406	114.606.045.926	(2.293.071.520)	(2,00)
Beban Lembur	3.893.040.000	3.291.972.050	601.067.950	18,26
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	132.101.184.567	118.575.740.227	13.525.444.340	11,41
Total	248.307.198.973	236.473.758.203	11.833.440.770	5,00

Jika realisasi LO Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar minus Rp205.876.337,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	112.312.974.406	112.518.850.743	(205.876.337)
Beban Lembur	3.893.040.000	3.893.040.000	-
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	132.101.184.567	132.101.184.567	-
Total	248.307.198.973	248.513.075.310	(205.876.337)

Selisih realisasi menurut LO dan LRA sebesar minus Rp205.876.337,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pembayaran Gaji dan Tunj PNS s.d. 2021 atas beban Tahun 2022	(252.460.916)
Belanja Gaji dan Tunj PNS 2022 yang dibayarkan tahun 2023	56.703.479
Pendapatan yang masih harus diterima atas beban uang makan PNS	(10.118.900)
Total	(205.876.337)

Beban Persediaan
Rp5.375.350.556,00

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.375.350.556,00 dan Rp8.396.511.622,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas

barang-barang yang habis pakai.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 28 berikut ini:

Tabel 28
Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.469.115.531	1.490.360.278	(21.244.747)	(1,43)
Beban Persediaan bahan baku	3.885.000		3.885.000	100,00
Beban Persediaan Lainnya	3.902.350.025	6.906.151.344	(3.003.801.319)	(43,49)
Total	5.375.350.556	8.396.511.622	(3.021.161.066)	(35,98)

Realisasi Belanja Barang Persediaan Tahun 2022 menurut LRA sebesar Rp6.403.218.300,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp5.375.350.556,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Barang Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama Tahun 2022.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp52.132.363.463,0
0*

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp52.132.363.463,00 dan Rp45.420.271.383,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 29 berikut ini:

Tabel 29
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Operasional	19.704.153.631	17.375.435.343	2.328.718.288	13,40
Beban Barang Non Operasional	7.890.405.963	7.479.610.794	410.795.169	5,49
Beban Jasa	24.537.803.869	20.515.900.915	4.021.902.954	19,60
Total	52.132.363.463	45.420.271.383	6.712.092.080	14,78

Jika realisasi LO Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp138.874.754,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 30
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	19.704.153.631	19.704.153.631	-
Beban Barang Non Operasional	7.890.405.963	7.890.405.963	-
Beban Jasa	24.537.803.869	24.398.929.115	138.874.754
Total	52.132.363.463	51.993.488.709	138.874.754

Selisih realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp138.874.754,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran langganan daya dan jasa s.d. tahun 2022 atas beban yang terutang tahun 2021	(412.649.186)
Belanja Barang dan Jasa 2022 yang belum dibayarkan	551.523.940
Total	138.874.754

Beban
Pemeliharaan
Rp9.674.756.730,00

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.674.756.730,00 dan Rp9.006.803.988,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi dapat digunakan secara normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 31 berikut ini:

Tabel 31
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.995.447.930	3.403.148.967	592.298.963	17,40
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	801.112.977	1.601.242.325	(800.129.348)	(49,97)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.315.930.417	3.511.993.080	803.937.337	22,89
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	562.265.406	490.419.616	71.845.790	14,65
Total	9.674.756.730	9.006.803.988	667.952.742	7,42

Jika realisasi LO Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar minus Rp36.044.434,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 32 berikut ini:

Tabel 32
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.995.447.930	3.995.447.930	-
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	801.112.977	801.112.977	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.315.930.417	4.388.290.532	(72.360.115)
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	562.265.406	525.949.725	36.315.681
Total	9.674.756.730	9.710.801.164	(36.044.434)

Selisih realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan sebesar minus Rp72.360.115,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Sisa kupon BBM yang dibeli pada tahun 2021 namun digunakan pada tahun 2022	82.215.000
Sisa kupon BBM yang dibeli pada tahun 2022 namun belum digunakan	(63.245.000)
Belanja pemeliharaan yang menjadi aset tetap peralatan dan mesin	(91.330.115)
Total	(72.360.115)

Sedangkan selisih sebesar Rp36.315.681,00 disebabkan Belanja Barang Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama Tahun 2022.

Beban Perjalanan Dinas
Rp113.069.434.190,00

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp113.069.434.190,00 dan Rp83.697.141.834,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 33 berikut ini:

Tabel 33
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	79.824.181.363	49.954.981.288	29.869.200.075	59,79
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.768.125.800	5.713.559.791	8.054.566.009	140,97
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	6.276.915.522	4.270.489.000	2.006.426.522	46,98
Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi COVID-19	2.493.727.911	19.604.309.770	(17.110.581.859)	(87,28)
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	10.706.483.594	4.153.801.985	6.552.681.609	157,75
Total	113.069.434.190	83.697.141.834	29.372.292.356	35,09

Realisasi LO Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 sama dengan realisasi LRA.

**Beban Penyusutan
dan Amortisasi**
Rp29.288.021.612,0
0

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp29.288.021.612,00 dan Rp26.086.803.769,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 34 berikut ini:

Tabel 34
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.861.407.179	15.014.745.848	1.846.661.331	12,30
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.612.491.460	10.102.648.894	509.842.566	5,05
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.066.300	11.066.300	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	146.498.308	151.150.551	(4.652.243)	(3,08)
Beban Amortisasi Software	1.498.235.308	659.338.242	838.897.066	127,23
Beban Amortisasi Lisensi	132.000.000	132.000.000	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam	26.323.057	15.853.934	10.469.123	66,03
Total	29.288.021.612	26.086.803.769	3.201.217.843	12,27

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp146.848.691,00

D.1.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp146.848.691,00 dan minus Rp197.109.299,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2022 dan 2021 dapat disajikan Tabel 35 berikut ini:

Tabel 35
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	196.426.020	(196.426.020)	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Tagihan TP/TGR	146.848.691	(393.535.319)	540.384.010	(137,32)
Total	146.848.691	(197.109.299)	343.957.990	(174,50)

Beban Khusus
Penanganan
Pandemi COVID-19
Rp5.561.547.034,00

D.1.2.8. Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Beban khusus penanganan pandemi COVID-19 disajikan pada Tabel berikut ini:

Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	267.482.414	267.482.414
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	224.958.709	224.958.709
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	2.575.378.000	2.575.378.000
524115	Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi COVID-19	2.493.727.911	2.493.727.911
	Total	5.561.547.034	5.561.547.034

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp7.318.910.865,00

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7.318.910.865,00 dan Rp713.075.951,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp7.318.910.865,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp380.208.797,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp6.938.702.068,00.

Surplus/(Defisit)
dari Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp380.208.797,00

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp380.208.797,00, dan Rp50.910.195,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp380.208.797,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00.

Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp380.208.797,00

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp380.208.797,00 dan Rp50.999.999,00. Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 sebesar Rp380.208.797,00 merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 36 berikut ini:

Tabel 36
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindah-tanganan BMN Lainnya	380.208.797	50.999.999	329.208.798	645,51
Total	380.208.797	50.999.999	329.208.798	645,51

Realisasi LO Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 sama dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

**Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp0,00**

D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp89.804,00.

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	31/12/2022	31/12/2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	89.804	89.804	(100,00)
Total	-	89.804	89.804	(100,00)

**Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp6.938.702.068,00**

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.938.702.068,00 dan Rp662.165.756,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp6.938.702.068,00 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp6.938.702.068,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

**Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp6.938.702.068,00**

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.938.702.068,00 dan Rp970.301.702,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 37 berikut ini:

**Tabel 37
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	506.564.332	516.735.008	(10.170.676)	(1,97)
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	5.870.619.839	-	5.870.619.839	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	145.880.049	230.659.359	(84.779.310)	(36,76)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	226.631.650	-	226.631.650	100,00

Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	6.066.250	(6.066.250)	(100,00)
Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	189.006.198	216.841.085	(27.834.887)	(12,84)
Total	6.938.702.068	970.301.702	5.968.400.366	615,11

Jika realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp42.329.652,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 38 berikut ini:

Tabel 38
Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	506.564.332	440.836.295	65.728.037
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	5.870.619.839	5.870.619.839	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	145.880.049	145.880.049	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	226.631.650	226.261.650	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	23.398.385	(23.398.385)
Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	189.006.198	189.006.198	-
Total	6.938.702.068	6.896.372.416	42.329.652

Selisih Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebesar Rp65.728.037,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Penetapan Tagihan GRID Lancar	506.564.332
Pendapatan atas Piutang TGR sebelum Tahun 2022	(161.327.795)
Pendapatan Tagihan GRID Tahun 2022	(277.758.500)
Angsuran atas Tagihan Pengembalian Bea Siswa	(1.750.000)
Total	65.728.037

Selisih Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp23.398.385,00 merupakan pengembalian belanja atas koreksi BPK.

Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp0,00

D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp308.135.946,00.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada Tabel 39 berikut ini:

Tabel 39
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	
Beban Persediaan Rusak/Usang	0	49.930.511	(49.930.511)	(100)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	258.205.435	(258.205.435)	(100)
Total	0	308.135.946	308.135.946	(100)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp904.028.368.986,00

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp904.028.368.986,00 dan Rp904.789.124.529,00.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp450.115.136.209,00
)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar minus Rp450.115.136.209,00 dan minus Rp407.686.166.794,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Koreksi Yang
Menambah/
(Mengurangi) Ekuitas
(Rp2.349.844.871,00)

E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.349.844.871,00 dan minus Rp2.697.866.699,00. Jumlah per 31 Desember 2022 dan 2021 tersebut terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(2.525.655.317)	(2.695.656.699)
Lain – Lain	175.810.446	(2.210.000)
Total	(2.349.844.871)	(2.697.866.699)

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
(Rp2.525.655.317,00)

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar minus Rp2.525.655.317,00 dan minus Rp2.695.656.699,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Tanah	(2.527.738.092)
Gedung dan Bangunan	(23.398.385)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.082.775
Pengembalian Belanja Modal TAYL	23.398.385
Total	(2.525.655.317)

Koreksi Lain-lain
Rp175.810.446,00

E.3.2. Koreksi Lain-lain

Jumlah Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp175.810.446,00 dan minus Rp2.210.000,00. Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2022 merupakan koreksi pencatatan piutang dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Koreksi Pencatatan awal atas transaksi pada modul piutang	178.678.221
Koreksi Penyesuaian Nilai piutang	18.561.225
Koreksi Hapus Piutang	(21.429.000)
Total	175.810.446

Transaksi Antar Entitas
Rp454.695.606.778,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp454.695.606.778,00 dan Rp409.623.277.950,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 2021. terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	461.931.287.427	413.281.497.706
Diterima dari Entitas Lain	(7.984.438.313)	(1.332.884.447)
Transfer Keluar	(377.472.442)	(9.325.345.134)
Transfer Masuk	1.126.230.106	7.000.009.825
Total	454.695.606.778	409.623.277.950

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp461.931.287.427,00

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp461.931.287.427,00 dan Rp413.281.497.706,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2022.

Diterima dari Entitas Lain
(Rp7.984.438.313,00)

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 30 September 2021 dan 2020 masing-masing sebesar minus Rp7.984.438.313,00 dan minus Rp1.332.884.447,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022.

Transfer Keluar
(Rp377.472.442,00)

E.4.3. Transfer Keluar

Jumlah Transfer Keluar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar minus Rp377.472.442,00 dan minus Rp9.325.345.134,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan transfer aset antar satuan kerja di lingkungan BPKP. berupa Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Satker Penerima	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Perw. BPKP Provinsi Kalimantan Utara	50.488.066	(22.319.032)	28.169.034
Perw. BPKP Provinsi Bengkulu	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi DKI Jakarta	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Jawa Barat	34.197.746	(14.173.872)	20.023.874
Perw. BPKP Provinsi Jawa Tengah	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Jawa Timur	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Aceh	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Sumatera Utara	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Sumatera Selatan	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Sumatera Barat	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Kalimantan Barat	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Sulawesi Utara	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	22.917.000	(8.533.500)	14.383.500
Perw. BPKP Provinsi Maluku	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Bali	507.495.000	(494.831.000)	12.664.000
Perw. BPKP Provinsi Riau	22.917.000	(8.533.500)	14.383.500
Perw. BPKP Provinsi Lampung	16.905.000	(6.076.000)	10.829.000
Perw. BPKP Provinsi Kalimantan Timur	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Jambi	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Banten	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Kepulauan Riau	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Bangka Belitung	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	57.017.000	(25.583.500)	31.433.500
Perw. BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	9.750.000	(1.950.000)	7.800.000
Perw. BPKP Provinsi Sulawesi Barat	48.113.066	(21.131.532)	26.981.534

Satker Penerima	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Perw. BPKP Provinsi Gorontalo	43.850.000	(19.000.000)	24.850.000
Perw. BPKP Provinsi Maluku Utara	25.292.000	(9.721.000)	15.571.000
Perw. BPKP Provinsi Papua Barat	22.917.000	(8.533.500)	14.383.500
Jumlah	1.056.858.878	(679.386.436)	377.472.442

Transfer Masuk
Rp1.126.230.106,00

E.4.4. Transfer Masuk

Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.126.230.106,00 dan Rp7.000.009.825,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan nilai buku aset yang ditransfer antar satuan kerja di lingkungan BPKP berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp835.230.106,00 dan aset tak berwujud sebesar Rp291.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Satker Pengirim	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Pusdiklatwas BPKP	817.449.840	(101.899.875)	715.549.965
Perw. BPKP Provinsi Bengkulu	33.542.000	(26.294.500)	7.247.500
Perw. BPKP Provinsi Aceh	38.516.000	(25.637.250)	12.878.750
Perw. BPKP Provinsi Riau	12.990.000	(6.495.000)	6.495.000
Perw. BPKP Provinsi Kalimantan Barat	52.548.000	(30.141.000)	22.407.000
Puslitbangwas	740.209.108	(720.232.049)	19.977.059
Perw. BPKP Provinsi Gorontalo	57.443.916	(28.721.958)	28.721.958
Perw. BPKP Provinsi Maluku Utara	43.245.750	(21.292.876)	21.952.874
Pusbin JFA	291.000.000	0	291.000.000
Jumlah	2.086.944.614	(960.714.508)	1.126.230.106

Ekuitas Akhir
Rp906.258.994.684,00

E.5. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp906.258.994.684,00 dan Rp904.028.368.986,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp907.459.000.854,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp1.200.006.170,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Informasi Dana Bantuan Kedinasan

F.1. Informasi Dana Bantuan Kedinasan

Selama Tahun 2022 kegiatan pengawasan di Kantor Pusat BPKP selain didanai dari DIPA Kantor Pusat BPKP, juga berasal dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan BUMN/BUMD yang menjadi mitra kerja masing-masing di lingkungan Kantor Pusat BPKP, yang anggarannya tidak tersedia dalam DIPA. Sampai dengan 31 Desember 2022, jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 412 penugasan dan 412 LHP yang dihasilkan. Adapun realisasi dana bantuan kedinasan sebesar Rp8.938.246.984,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Unit Kerja	PP	Lap	Jumlah Dana
1	Deputi Bidang Perekonomian	101	101	3.015.170.239
2	Deputi Bidang Polhukam	18	18	489.138.461
3	Deputi PKD	13	13	525.181.628
4	Deputi AN	278	278	4.833.381.976
5	Deputi Investigasi	2	2	75.374.680
Total		412	412	8.938.246.984

Dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai Kantor Pusat BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-masing diterbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/ transport lokal, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku.